



Implementasi Kebijakan Distribusi Program Raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang

Elsa Rizki Maharani[✉]

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juli 2017

Disetujui September 2017

Dipublikasikan

November 2017

Keywords:

Policy Implementation, Raskin Program, Kawengen Village

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang. Fokus penelitian ini adalah implementasi program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang yang hingga saat ini masih memunculkan beberapa permasalahan. pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang belum sesuai dengan tujuan dan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan. Sebab ketidakcepatan administrasi yang menyebabkan tersendatnya pembayaran uang HTR dari rumah tangga sasaran kepada pelaksanaan distribusi Desa Kawengen mengindikasikan belum sepenuhnya tercapai indikator keberhasilan raskin terkait 6 tepat.

Abstract

The purpose of this study is to the implementation of Raskin program in Kawengen Village, Semarang Regency. The focus of this research is all stages of the implementation of the distribution of Raskin program in Kawengen Village, Semarang Regency, which until now still raises several problems. This research approach using qualitative research method with descriptive model. This research uses interactive data model analysis by Miles and Huberman. Based on the results of the research can be seen that the implementation of Raskin program in Kawengen Village Semarang Regency has not been in accordance with the objectives and has not fully run optimally as expected. Because of the inaccuracy of the administration that caused the hTR payment of the HTR money from the target households to the distribution of Kawengen Village Village indicates that there has not been a complete indicator of the success of raskin related to the precise six.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

ISSN 2252-6965

Gedung L2 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: ecca.ranie@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah yang seiring berjalan dengan baik, karena sebagian besar pendapatan dari masyarakatnya mengalami kenaikan. Hal tersebut, tidak terjadi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan taraf hidup masyarakat tersebut rendah. Sehingga memberikan dampak terhadap tingginya angka kemiskinan sebanyak 13,58% pada september 2014 (BPS Jawa Tengah, 2015) yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui instrumen kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan bahwa pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pangan diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin agar terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat.

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan salah satu subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin atau keluarga rentan miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Melalui program ini, pemerintah memberikan kompensasi (subsidi) berupa beras dengan harga murah dan terjangkau orang miskin. Hal ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah akan dampak sosio-ekonomi dari krisis yang berkepanjangan (Zarida, 2017). Menurut PAGU (Plafon Gubernur) Alokasi Raskin Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015, masing-masing keluarga akan menerima 15 kg/KK/bulan dengan durasi waktu pendistribusian selama 12 bulan dengan harga netto sebesar Rp.1.600/kg di titik distribusi. Penjualan beras diketahui melibatkan fungsi bisnis bertingkat. Pola penjualan beras tidak hanya pada satu sub sektor saja (Adam, 2017).

Menurut WFP (2015:5) Raskin merupakan program beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin yang berperan sebagai transfer pendapatan

dengan menggunakan bahan pangan sebagai modalitas utamanya. Lebih dari setengah masyarakat Jawa Tengah cenderung memilih menerima beras miskin dibandingkan tidak menerima beras miskin, terutama pada masyarakat pedesaan sebagai penerima raskin yang paling banyak (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang sangat rentan terhadap kenaikan harga beras. Jika harga beras naik, maka banyak rakyat pedesaan yang kemudian beralih menjadi masuk kategori miskin. Sedangkan di sisi lain, jika harga beras tidak naik, maka petani pangan (padi) juga tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Karena hidup mereka harus berkejadian dengan kenaikan hidup lainnya (Aunur Rofiq, 2014:68-69).

Berdasarkan data realisasi menurut Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Jawa Tengah dapat terlihat bahwa peningkatan pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang mencapai 85,84 % terjadi di Kabupaten Semarang. Hal ini terjadi pada saat penyaluran beras raskin yang di terima rumah tangga sasaran terdapat penambahan kuantum beras raskin menjadi 14 kali penyaluran dalam satu tahun. Penambahan beras raskin ini mengacu pada keputusan Kementerian Sosial dalam upaya membantu warga tidak mampu akibat kekeringan dan tingginya harga beras di pasaran (Kementerian Perdagangan, 2015:3). Permasalahan tersebut muncul dan terjadi peningkatan raskin dalam kurun waktu selama 2-3 bulan. Namun, pelunasan pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) berada pada bulan ketiga. Kondisi demikian, dikarenakan masih adanya penyalahgunaan kewenangan dan penangguhan pembayaran uang HTR oleh oknum pelaksana yang berakibat penundaan distribusi raskin bulan berikutnya (Kemenko Kesra, 2015:44).

Penelitian ini akan difokuskan pada wilayah pedesaan dengan lokasi penelitian di hunian masyarakat desa penerima raskin. Lokasi penelitian tepatnya berada di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Kawengen karena ditemukan permasalahan-

permasalahan mengenai implementasi program raskin yang peneliti dapatkan melalui hasil observasi diantaranya ketidaktepatan administrasi, kualitas beras yang rendah, serta ketidakpedulian dari aparat pelaksana distribusi terhadap pelaksanaan program raskin.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan program raskin di Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Fokus penelitian ini merupakan pokok-pokok kajian yang menjadi pusat perhatian dari penelitian ini dalam proses pelaksanaan distribusi program raskin di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Teknik penentuan informasi penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria-kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Raskin di Desa Kawengen

Dalam implementasi suatu program yang menunjukkan pada model kelayakan kebijakan bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek kelayakan program tersebut, yakni jenis program, penerima program, dan organisasi pelaksanaan program (Subarsono, 2016:60). Oleh karena itu, organisasi pelaksana harus mampu memiliki kompetensi untuk menangani suatu jenis kebijakan supaya dapat berhasil. Selain itu, *outcome* dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan atau *target group*, supaya

kebijakan tersebut terasa bermanfaat. Pembahasan implementasi program raskin dalam penelitian ini akan difokuskan pada isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menurut teori Grindle.

Ada beberapa isi kebijakan program raskin diantaranya adalah (1) Kepentingan kelompok sasara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepentingan yang mempengaruhi implementasi program raskin di Desa Kawengen secara politikal di lapangan adalah sebagian besar masyarakat Desa Kawengen yang paham tentang program raskin begitupun juga ketua RT sebagai pelaksana distribusi program raskin yang paham siapa sasaran penerima raskin. Namun, karena melihat kondisi masyarakat Desa Kawengen. Berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan para pelaksana distribusi maka beras raskin tersebut dibagikan secara merata dan adil. (2) Tipe manfaat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi pada tingkat kepuasan masyarakat penerima beras raskin sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya program raskin sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Terutama bagi warga yang memiliki anggota keluarga yang banyak merasa terbantu dengan adanya beras raskin tersebut. (3) Derajat perubahan yang diinginkan. Hasil penelitian tersebut terkait perubahan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan adanya program raskin ini bahwa masyarakat Desa Kawengen mampu membeli/menebus beras raskin untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras sebagai *basic need*. (4) Letak pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak ketua RW/RT maupun sekretaris desa (sekdes) sebagai pengambil keputusan sudah mengupayakan terkait pelunasan pembayaran Harga Tebus Beras Miskin (HTB) tersebut terhadap warganya. Namun, karena melihat kondisi masyarakat Desa Kawengen tersebut dari pihak ketua RW/RT maupun sekretaris desa (sekdes) harus menunda pembayaran HTB kepada Bulog. (5) Pelaksanaan program. Hasil penelitian tersebut dapat dimaknai bahwa pelaksanaan program raskin di Desa Kawengen sudah berjalan dengan baik. Namun, keterlambatan pembayaran raskin tersebut menyebabkan terjadinya faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal berasal dari aparat desa maupun pelaksana distribusi yang kurang berkompeten pada tugasnya

dalam menyalurkan beras raskin. Sedangkan, faktor eksternal adalah kondisi masyarakat Desa Kawengen. (6) Sumberdaya yang digunakan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sumber daya pelaksana program raskin di Desa Kawengen dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman. Akan tetapi perlunya untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan agar kualitas dari aparat yang berperan sebagai pelaksana program raskin mencukupi dan lebih baik kedepannya. Lingkungan kebijakan program raskin diantaranya adalah (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Hasil penelitian berdasarkan data dan informasi di lapangan menjelaskan bahwa kekuasaan dan kepentingan para aktor terlihat cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyatnya diikuti strategi implementasi yang terlibat dilakukan oleh para stakeholder yang berperan sebagai pelaksana distribusi program raskin. (2) Karakteristik lembaga dan penguasa. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa di Desa Kawengen dinilai cukup mampu untuk melaksanakan program raskin tersebut. Namun, melihat akan kondisi masyarakat Desa Kawengen. Sehingga membuat kurang tegas dan kurang mahirnya aparat sebagai pelaksana distribusi dalam melaksanakan program tersebut. (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas rumah tangga sasaran di Desa Kawengen terhadap program pemerintah sangat merespon baik dan antusias dalam pelaksanaan penyaluran program raskin tersebut. Namun, respon aparat/personel Desa Kawengen terhadap program raskin yang dinilai masih mengabaikan. Sehingga menyebabkan kurang berfungsinya mekanisme layanan pengaduan terhadap program tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil pengamatan dan wawancara dapat dimaknai bahwa implementasi distribusi program raskin di Desa Kawengen dalam proses pelaksanaan programnya telah sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program. Secara teknis dari proses pelaksanaan pendistribusian raskin di Desa Kawengen terlihat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam tahapan akhir pelaksanaan program raskin tersebut, pembayaran RTS-PM masih mengalami

keterlambatan. Sehingga implementasi program raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang dapat dikatakan masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena pada saat proses penyaluran sebagian besar aparat desa belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan maupun pendataan terhadap pelaksanaan program.

Selain menggunakan teori Grindle, indikator ukuran kinerja program raskin juga digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari program raskin diantaranya adalah (1) Tepat sasaran penerima manfaat. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa tidak secara keseluruhan baik RT maupun RW atas kesepakatan warga agar beras dibagikan rata untuk semua warga. Termasuk warga yang mampu juga mendapatkan beras raskin tersebut. (2) Tepat jumlah. Berdasarkan observasi tersebut dapat dijelaskan bahwa akibat dibagi ratanya beras raskin tersebut, maka setiap RTS-PM tidak mendapatkan jumlah beras sesuai dengan aturan dan pembagian beras raskin tergantung dari kondisi warga dan banyak sedikitnya warga di Desa Kawengen. (3) Tepat mutu (kualitas). Berdasarkan observasi dapat dimaknai bahwa masih ditemukannya kualitas beras yang tidak layak untuk dikonsumsi, seperti beras yang berkulit, bau, dan hitam. Dalam 12 kali penyaluran raskin, rumah tangga miskin di Desa Kawengen hanya menemukan 2-3 kali kualitas beras yang cukup baik dan layak untuk dikonsumsi. (4) Tepat harga. Berdasarkan observasi mengenai tepat harga menunjukkan bahwa seluruh warga di Desa Kawengen yang terdaftar menjadi RTS-PM dapat menerima beras raskin sebesar Rp. 1.600/kg di titik distribusi. (5) Tepat waktu. Berdasarkan observasi ditunjukkan bahwa masih ditemukannya penyaluran beras raskin yang belum sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Terkadang waktu penyaluran beras raskin kepada RTS-PM belum tepat waktu dan terkesan mundur. Ketidak tepatan waktu tersebut merupakan hambatan dari setiap tahapan pelaksanaan pendistribusian raskin, penyebab dari hambatan tersebut adanya ketidak tepatan pembayaran beras raskin yang tidak sesuai dengan aturannya. (6) Tepat administrasi. Berdasarkan observasi menjelaskan bahwa masih sering ditemukannya pelaksana distribusi yang masih menunda-nunda menyetorkan uang raskin tersebut.

Beberapa pelaksana distribusi raskin sebagian besar adalah ketua RT yang masih menunda uang raskin tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa keberhasilan dari suatu program raskin yang ditunjukkan pada ukuran kinerja raskin tahun 2015 tergolong masih rendah. Kinerja dari program raskin di Desa Kawengen yang cenderung masih sangat rendah adalah belum tepatnya administrasi program raskin yang mengakibatkan belum tepatnya sasaran penerima beras raskin dalam penyaluran raskin di Desa Kawengen. Secara teknis proses pelaksanaan pendistribusian beras raskin di Desa Kawengen sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Namun, pelaksanaan pembayaran raskin oleh RTS kepada pelaksana distribusi, karena hambatannya adalah masih ditemukannya pelaksana distribusi yang sering menunda-nunda menyetorkan uang raskin.

Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kawengen

Hasil pengamatan menjelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan penyaluran program raskin di Desa Kawengen diawali dari surat permintaan alokasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama Pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Sebelum pengiriman beras raskin ke titik distribusi melakukan pengecekan kondisi beras raskin yang akan disalurkan. Kemudian beras raskin dikirimkan ke titik distribusi sesuai dengan tujuan dan jumlah rumah tangga sasaran penerima beras raskin di Desa Kawengen. Pengiriman beras raskin di Desa Kawengen diturunkan di titik distribusi yang terletak di Kantor Desa dan rumah sekretaris desa. Beras raskin yang sudah diturunkan dibawa oleh titik bagi dan diserahkan kepada RTS-PM. Titik bagi di Desa Kawengen sebagian besar adalah masing-masing ketua RT yang berperan sebagai pelaksana distribusi di Desa Kawengen.

Dalam pelaksanaan program raskin di Desa Kawengen menghadapi banyak kendala diantaranya (a) Penyimpangan kualitas beras raskin yang kadang jelek kadang bagus. (b) Data RTS dari Pemkab dengan data yang ada di lapangan belum tepat pada sasarnanya. (c) Pengambilan beras raskin tidak menggunakan kartu kendali, melainkan RTS harus menandatangani daftar penerima raskin

setiap pengambilan beras raskin tersebut. (d) Kebijakan ketua RT yang berbeda-beda, sehingga memicu pembagian beras raskin yang tidak sesuai dengan aturannya sebanyak 15/kg/RTS. (e) Ketidaktepatan administrasi yang disebabkan disebabkan lemahnya pengawasan oleh aparat desa terhadap penyaluran beras raskin, sehingga menyebabkan pembayaran raskin di Desa Kawengen juga ikut tertunda.

Dalam pelaksanaan program raskin, terdapat beberapa strategi pengelolaan program raskin diantaranya: (a) Mengoptimalkan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan mengenai pelaksanaan penyaluran program raskin dan peraturan Bupati. (b) Untuk meningkatkan dan memotivasi kinerja raskin, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan *reward* (penghargaan) di tingkat desa/kelurahan. (c) Memberikan sanksi tegas dan jelas terhadap penyimpangan yang terjadi. (d) Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja raskin sampai kualitas beras raskin dalam melaksanakan program raskin. (e) Meningkatkan pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja pelaksana program raskin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan pembahasan menurut teori Grindle dan indikator ukuran kinerja program raskin berdasarkan enam tepat menunjukkan bahwa implementasi program raskin di Desa Kawengen Kecamatan Ugaran Timur Kabupaten Semarang belum bisa berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan. Karena ketidaktepatan administrasi yang disebabkan tersendatnya pembayaran uang HTR dari rumah tangga sasaran kepada pihak Desa Kawengen.

Hasil pengamatan terhadap mekanisme pelaksanaan program raskin di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang kurang efektif dalam pendistribusian, sebab banyaknya titik bagi yang diperlukan oleh ketua RT sebagai pelaksana distribusi raskin di Desa Kawengen. Sehingga mengakibatkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan program raskin dan minimnya kuantitas beras raskin yang diperoleh rumah tangga sasaran.

Bagi pemerintah terhadap pelaksanaan program raskin, baik dari Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, maupun Desa Kawengen perlu meningkatkan pengawasan dan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan distribusi program raskin. Mengadakan sosialisasi kembali terhadap pelaksanaan program raskin yang bertujuan untuk mencari titik temu atau solusi dalam permasalahan tersebut, agar dapat segera mengatasi permasalahan yang sering terjadi.

Bagi penerima raskin yang terdaftar sebagai RTS-PM maupun tidak terdaftar sebagai RTS-PM diharapkan dapat membuka peluang untuk program-program pemerintah lainnya, seperti program pemerintah desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Marwa, T., Azwardi, Thamrin., K. M. H., Bashir. A. 2017. Analysis of Rice Distribution in South Sumatera, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 166-171.
- Andrida, Rini, Setiadi Djohar, dan Idqan Fahmi. 2011. Analisis Kepuasan Rumah Tangga Penerima Manfaat Raskin di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 8, No. 1.
- Bungkaes, Heri Risal, J. H. Posumah, dan Burhanudin Kiyai. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Acta Diurna, Edisi April 2013*.
- Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme (WFP). 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta.
- Fandaru, Raden Rahman Asjhatri. 2016. A New Design of Raskin Program (An Analysis of the RASDA Implementation in Kulonprogo Regency). *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 20, No.1.
- Hutagaol, M. Parulian, Alla Asmara. 2008. Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2007. *Jurnal Argo Ekonomi*, Vol. 26, No. 2.
- Karsinah. 2010. Evaluasi Pembagian Raskin di Kabupaten Bantul Tahun 2007 dengan Pendekatan Vulnerability Analysis and Mapping (VAM). *Jejak*, Vol. 3, No.1.
- Kementerian Perdagangan. 2015. *Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Tahun 2015*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2015. Analisis Perbaikan Program Raskin: Alternatif Penggantian Kebijakan dengan Program Ketahanan Pangan Lainnya. Jakarta.
- Kususmawardhani, Astrida Dwi. 2008. Studi Implementasi Kebijakan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Barusari Semarang. *Resume Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Mauliyawati, Itsna, Sudarso, Kismartini. 2004. Studi Evaluasi Kinerja Program Raskin di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. *JIAKP*, Vol. 1, No. 1.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musawa, Mariyam. 2009. Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Nisak, Amelia Fitrotun. 2014. Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif pada Kelurahan Tanah Kalikedinding. *JURNAL UNAIR*, Vol 3, No. 2.
- Panjaya, Yossy Herma. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus: Di Kelurahan Pedurungan Kidul). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Penerbit Republika.

- Rofiq, Aunur. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jakarta: Republika Penerbit.
- Subarsono, AG. 2016. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Mayarni. 2012. Implementasi Program Raskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2.
- Tana, Rino Tri. 2015. Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *ejurnal administrasi negara*, Vol. 3, No. 1.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/> (Diakses pada tanggal 21 Februari 2017).
- <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/06/12/pemrintah-terus-berupaya-program-raskin-tepat-sasaran/> (Diakses pada tanggal 23 Februari 2017).
- Wahyudi, Arif. 2010. Evaluasi Kinerja Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong). *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zarida. 2017. Raskin Program: A Public Policy Analysis. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, 5(7).
- <https://jateng.bps.go.id/Brs/view/id/6/> (Diakses pada tanggal 20 Februari 2017).